



Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Mitigasi Ancaman Peperangan Asimetris

Abdul Rahman^{1,3)}, Saleha Mufida¹⁾, Admiral Musa Julius^{2,4)}, Surryanto Djoko Waluyo¹⁾

1) Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

2) Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

3) Satuan Brimob Polda Riau, POLRI, Indonesia

4) Pusat Gempabumi dan Tsunami, BMKG, Indonesia

Abstrak

Provinsi Riau memiliki Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) guna mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau dan menjadi bagian dari lembaga yang mendukung dan membantu mewujudkan cita-cita Provinsi Riau. Penulis akan membahas optimalisasi pemberdayaan LAMR sebagai upaya bela negara dalam mitigasi ancaman peperangan asimetris menggunakan teori pemberdayaan, teori peperangan asimetris, konsep pertahanan non militer dan konsep bela negara. Pada sistem pertahanan negara, LAMR berposisi sebagai komponen cadangan dalam mencegah potensi peperangan asimetris.

Kata Kunci: etnis melayu, provinsi riau, pertahanan semesta, peperangan asimetris, bela negara

*Correspondence Address : abdul.rahman@idu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v7i1.2020.229-237

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Peperangan asimetris merupakan model peperangan yang dikembangkan dengan cara berpikir tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra berupa geografi, demografi, dan sumber daya alam serta pancagatra yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Samego, I., 2019).

Peperangan asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol yakni kekuatan yang antara keduanya tidak seimbang (Dewan Riset Nasional, 2017). Peperangan asimetris tidak hanya menggunakan cara-cara militer tetapi juga meluas ke taktik disinformasi (propaganda), tekanan ekonomi, pengaruh sosial-budaya, juga pertahanan dan keamanan. Dalam menghadapi ancaman, peperangan asimetris tidak dapat dilawan hanya semata dengan cara-cara konvensional atau pendekatan militer.

Peperangan asimetris adalah metode perang gaya baru secara non militer, namun daya hancurnya tidak kalah atau bahkan lebih dahsyat dari pada perang militer. Medan pertempurannya pun juga sangat luas mencakup delapan aspek yakni

demografi, geografi, sumber daya alam, ideologi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (Samego, I., 2001).

Bergesernya generasi perang telah dimulai sejak awal Perang Dunia I pada tahun 1648 (generasi pertama) sampai dengan saat ini. Bahkan kini generasi perang diyakini sudah sampai generasi ke V. Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan bahwa di generasi kelima ini perang tidak menggunakan peluru dan bom, namun perang informasi dan propaganda serta perang ekonomi (Sulaiman, A. 2019). Untuk menjawab itu, maka Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* merumuskan konsep pertahanan (Tim Perumus Buku Putih Pertahanan, 2015).

Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap tanah air. Program bela negara dirancang untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan target mencapai 100 juta warga negara berkarakter militan. Program ini akan

terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara (Tim Perumus Buku Putih Pertahanan, 2015).

Provinsi Riau memiliki Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang berdiri dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 Tahun 2012. Dasar dibentuknya LAMR adalah guna mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau dan menjadi bagian dari lembaga yang mendukung dan membantu mewujudkan cita-cita Provinsi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaan Melayu se Asia Tenggara (Adriyanto, A., 2020).

Keberadaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam regenerasi dan sebagai bagian dari kader bela negara. Pada artikel ini penulis akan membahas optimalisasi pemberdayaan LAMR sebagai upaya bela negara dalam menghadapi ancaman peperangan asimetris (Anwar, S., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Teori pemberdayaan, teori peperangan asimetris, konsep pertahanan non militer dan konsep bela negara.

a. Teori Pemberdayaan

Suharto (2009) menuliskan bahwa pemberdayaan berasal dari kata

“power” kekuasaan atau keberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan yakni memberi ketenteraman kepada masyarakat yang lebih besar dan juga politik melalui aksi sosial saling membantu dan belajar guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Nurlia, E. dan Kabain, H., 2010). Dari pengertian dan tujuannya dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan sesuatu yang dimiliki untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat (Buffaloe, 2006).

b. Peperangan Asimetris

Peperangan asimetris dilakukan negara maju dengan pendekatan non-militer dari negara- untuk menghancurkan, mendominasi, menaklukkan atau mengendalikan energi dan sumber daya alam dari target melalui beberapa sektor seperti IPOLEKSOSBUDHANKAM. Peperangan asimetris tentu memberi ancaman yang bersifat multidimensi, yaitu munculnya ancaman baru seperti terorisme, anarki, pemberontakan, perkembangan isu SARA, berita *hoax*, *hate speak* dan serangan

siber (Parker, S dan West, D., 2017). Peperangan asimetris tidak mengenal waktu dan ruang, serta kepada siapa target yang akan dihancurkan, tidak mengindahkan aturan perang yang telah disepakati dan dapat menghancurkan lebih dari serangan bom atom (Yusgiantoro, P. 2019).

c. Konsep Pertahanan Non Militer

Sedangkan ancaman non militer menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer merupakan ancaman yang tak berwujud akan tetapi dampak yang dihasilkan sangat luar biasa (Samadhi, W.P., 2015). Adapun ancaman non militer dapat berupa ancaman pada astagatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum (Utama, A.P., 2019).

d. Konsep Bela Negara

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (3)

menyatakan bahwa “Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Adanya peraturan tersebut menjadi dasar bahwa semua warga negara tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun strata sosialnya memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti upaya bela negara (Kartiawan, C.B., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bela Negara sangat dibutuhkan dalam pertahanan nasional, karena sistem pertahanan Indonesia adalah semesta. Terdapat tiga komponen pertahanan yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melakukan tugas pertahanan (Simuru, A.K., 2010).

Komponen cadangan terdiri dari sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dimobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen

utama. Sedangkan komponen pendukungnya adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan cadangan (Jemadu, A., 2007).

Kita perlu menerapkan demokrasi konsosiasional. Karena demokrasi konsosiasional menyarankan agar semua aktor yang ada di dalam masyarakat melakukan kerjasama antara etnisitas. Demokrasi konsosiasional mengharapkan berbagai kelompok etnis itu saling merembes secara teritorial dan genetika. Sedangkan dari sudut pandang politik, demokrasi konsosiasional berusaha menciptakan suasana harmonis antar etnis dengan menerapkan dua nilai penting, yakni: *Pertama*, tidak terdapat susunan kelompok hirarkis sehingga tidak ada kelompok yang dominan atau yang mengeksploitatif yang lainnya; *Kedua*, terdapat pembagian kekuasaan politik yang sama dan semua kelompok etnis terwakili secara proporsional di dalam struktur kekuasaan (Gustiana A. K., 2015).

Ada empat prasyarat menurut Lijphart (1997) dalam mempraktekkan demokrasi konsosiasional di ranah lokal. *Pertama*, kemampuan dan kemauan untuk mengakui bahaya-bahaya

instabilitas yang merupakan inheren dalam masyarakat yang tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya tinggi; *Kedua*, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara *nationstate* yang ada. Artinya para tokoh masyarakat harus mempunyai keinginan untuk mencegah adanya kemungkinan disintegrasi daerah; *Ketiga*, ada kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub kultur masing-masing *cleavages* ke tingkat yang lebih tinggi; *Keempat*, ada kemampuan untuk menempa usaha mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing sub kultur, dengan ditemukannya aturan main yang jelas serta pada tingkat kelembagaan yang tepat (Samadhi, W.P., 2015).

Target dari pemberdayaan LAMR terletak pada komponen cadangan. Program bela negara perlu diberikan kepada pengurus LAMR dan program ini nantinya diteruskan sehingga bisa membentuk kader-kader bela negara yang akan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya dapat mengantisipasi setiap bentuk ancaman asimetris (Haboddin, M., 2012)

Melalui LAMR dapat dilakukan kegiatan yang memuat fungsi mitigasi sebagai berikut:

- 1) Menggali, mengembangkan dan mewariskan adat budaya Melayu yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan pembangunan bangsa.
- 2) Melakukan usaha-usaha untuk menemukan, mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi adat istiadat dan budaya Melayu yang terdapat di dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum Syarak dan hukum Negara.
- 3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua kalangan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- 4) Memberi saran kepada pemerintahan oleh LAM tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten.
- 5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak masyarakat Adat Melayu Riau sesuai dengan rasa Keadilan, Kepatutan dan Ketentuan hukum adat yang berlaku.
- 6) Melakukan usaha dalam kegiatan penyebarluasan kebijakan pengembangan adat istiadat dan budaya melayu Riau yang sudah ditetapkan baik oleh Lembaga Adat maupun bersama-sama dengan pihak Pemerintah (umara) dan masyarakat.
- 7) Melakukan kegiatan pelatihan Bela Negara dan mengadakan peningkatan kapasitas, FGD, Seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk membangun kekuatan komponen Pendukung yang siap akan di mobilisasi menjadi komponen cadangan dengan tetap memegang falsafah melayu menjunjung marwah diri setinggi-tingginya.
- 8) Melakukan kunjungan ke unit pendidikan untuk memberikan pengarahan dan penggalangan anak muda untuk bisa memahami isu aktual dan paradigm ancaman nasional.

Peran LAMR akan semakin luas. Selama ini, disadari ataupun tidak, banyak harta kekayaan, wilayah dan sumber daya alam kita yang telah diperebutkan dan dikuasai golongan-golongan tertentu. Itulah salah satu contoh perebutan ruang hidup sudah seharusnya diantisipasi oleh bangsa Indonesia yang dapat memicu konflik. Lebih lanjut, kelangsungan peradaban sangat ditentukan dan dibatasi oleh ruang dan sumber-sumber daya untuk kehidupan (Subiakto, Y., 2020).

Sebagai contoh, pada tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 milyar atau yang disebut ledakan demografi. Dengan populasi yang sedemikian besar dan akan terus bertambah, sementara sumber daya alam dan luas tempat tinggal tidak berubah, maka manusia di dunia akan semakin keras berebut untuk hidup, agar mereka dapat terus melanjutkan hidup (Hendropriyono, A.M., 2014).

Memahami perubahan tersebut akan menyadarkan kepada kita bahwa situasi internal dan eksternal menjadi pengaruh terbesar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara yang bilamana tidak dapat dicegah sejak dini akan memicu bencana. Pengurangan risiko konflik berupa penguatan LAMR dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang secara kolektif (Maarif, S., 2013).

SIMPULAN

LAMR merupakan lembaga yang salah satu fungsinya mengemban, mengamalkan, memelihara dan

membela nilai-nilai luhur adat Melayu Riau. Dengan Falsafah Pancasila yang dianut oleh LAMR, berasaskan Islam serta bersendikan Syara', kemudian Syara' bersendikan Kitabullah, sehingga pemberdayaan dapat maksimal dalam mencapai tujuannya yaitu menjadi kekuatan yang bisa digunakan dalam menghadapi persoalan bangsa berupa ancaman peperangan asimetris.

Penulis merekomendasikan agar LAMR tidak hanya berperan sebagai wadah pelengkap atau bahkan dimanfaatkan oleh penguasa belaka. LAMR juga diharapkan menyusun agenda kegiatan kajian budaya Melayu se Asia Tenggara untuk mendukung visi Riau menjadi pusat kebudayaan melayu se Asia Tenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Pertahanan sebagai lembaga pendidikan penulis yang telah memberi ilmu dan pengetahuan untuk mendukung penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A. (2020). *Diplomasi Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri*. Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Dalam dan Luar Negeri. UNHAN: Bogor.
- Anwar, S. (2019). *Bahan Ajar Sejarah Perang Dunia Pertama*. Bogor: Universitas

- Pertahanan.
- Buffaloe. (2006). *Defining Asymmetric Warfare*.
Virginia: The Institute of Land Warfare
- Dewan Riset Nasional. (2017). *Agenda Riset Nasional*. Jakarta.
- Gustiana A. K. (2015). *Etnisitas dalam Otonomi Daerah. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Volume 1, Number 1, Januari 2015.
- Haboddin, M. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang.
- Hendropriyono, A.M. (2014). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Jemadu, A. (2007). *Praktek-prektek Intelijen dan Pengawasan Demokratis - Pandangan Praktisi*. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Kartiawan, C. B. (2013). *Kamus Karakter Bangsa*. Bandung: Titian Ilmu.
- Maarif, S. (2013). *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Nurlia, E. Dan Kabain, H. (2010). *Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Citra Grafika Pratama.
- Parker, S., dan West, D. (2017). *Sejarah Singkat Dunia Peperangan*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer
- Samadhi, W.P. (2015). Desentralisasi Setengah Hati: Berpindahnya "Sentralisme" ke Daerah. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pada <https://media.neliti.com/media/publications/411-ID-desentralisasi-setengah-hati-berpindahnya-sentralisme-ke-daerah.pdf>
- Samego, I. (2019). *Bahan Ajar Sejarah Perang Dingin*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Samego, I. (2001). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara*. Analisis Potensi dan Problem. Jakarta: The Habibie Center.
- Simuru, K. (2010). *Relefantkah mengangkat issue Putra Daerah dalam kampanye pilkada*. Diakses tanggal 23 Maret 2020 pada <https://simurupdf.files.wordpress.com/2010/10/microsoft-word-putra-daerah-docx4.pdf>
- Subiakto, Y. 2020. *Cyber Warfare, Information Warfare & How It Creates Man Made Disaster (The History & Development Post 20th Century)*. Bahan Ajar Mata Kuliah Intelijen Bencana Akibat Perbuatan Manusia. UNHAN: Bogor.
- Sulaiman, A. (2019). *Perang Generasi Kelima Langsung Menusuk Pusat Kekuatan Indonesia*. Nusantara News.
- Tim Perumus Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Triutomo. S. (2020). *Disaster Risk Management and Sustainable Development*. Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Risiko Bencana (MRB). UNHAN: Bogor.

Utama, A.P. (2019). *RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Yusgiantoro, P. (2019). *Bahan Ajar Pengantar Sistem Pertahanan Negara*. Bogor: Universitas Pertahanan.